

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



MENUJU SOSIOLOGI BERAGAMA:
Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia
Moh Soehadha

**ANALYSING NIGERIA-BOKO HARAM CONFLICT
THROUGH THE PRISM OF MARX'S THEORY OF ECONOMIC DETERMINISM**
Moses Joseph Yakubu & Adewunmi J. Falode

AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA:
Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi
Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata

BERTAHAN DALAM PERUBAHAN:
Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh
Sehat Ihsan Shadiqin

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021

Editor in Chief

Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,
Malang

Pardamean Dauly

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



DAFTAR ISI

MENUJU SOSIOLOGI BERAGAMA: Paradigma Keilmuan dan Tantangan Kontemporer Kajian Sosiologi Agama di Indonesia	
Moh Soehadha.....	1-20
ANALYSING NIGERIA-BOKO HARAM CONFLICT THROUGH THE PRISM OF MARX’S THEORY OF ECONOMIC DETERMINISM	
Moses Joseph Yakubu, Adewunmi J. Falode.....	21-32
AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA: Studi Masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi	
Mahli Zainuddin, Ahmad-Norma Permata.....	33-52
BERTAHAN DALAM PERUBAHAN: Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh	
Sehat Ihsan Shadiqin	53-70
TRADISI PERLAWANAN KULTURAL MASYARAKAT SAMIN	
Nazar Nurdin, Ubbadul Adzkiya’	71-86
MENEMUKAN ALTERNATIF MODEL DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA (BELAJAR DARI FORUM SOBAT)	
Nani Minarni.....	87-106
KONSTRUKSI <i>GATED COMMUNITY</i>: Perubahan dan Tantangan Masyarakat Perumahan (Studi di Perumahan BSB, Mijen Kota Semarang)	
Endang Supriadi	107-128

BERTAHAN DALAM PERUBAHAN: Modifikasi dan Afiliasi Politik Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh

Sehat Ihsan Shadiqin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: sehatihsan@ar-raniry.ac.id



Abstrak

Sebuah organisasi sosial-keagamaan secara alamiah memiliki naluri untuk bertahan dalam perubahan sosial yang ada di sekitarnya, termasuk gerakan tarekat. Perubahan ini dilakukan untuk mengumpulkan lebih banyak jamaah dan mempertahankan eksistensi gerakan di tengah lingkungannya. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh merupakan tarekat yang masih baru dibandingkan tarekat lain yang sudah ada di sana sebelumnya. Perubahan politik yang dinamis di Aceh juga mempengaruhi perubahan dalam bidang keagamaan. Artikel ini akan mencoba menjelaskan proses perubahan yang terjadi dalam gerakan tarekat Naqsyabandiyah di Aceh, bentuk perubahannya, dan relasi perubahan tersebut dengan kekuasaan. Dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dengan kelompok pelaku tarekat tampak bahwa perubahan dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang ada di Aceh terkait erat dengan peran yang dimainkan oleh aktor-aktor tarekat sebagai agensinya. Perubahan itu juga berbeda antara apa yang dilakukan oleh satu tokoh dengan tokoh lainnya. Penulis berpendapat bahwa perubahan dalam tarekat di Aceh mengarah kepada upaya membangun eksistensi diri di tengah perubahan sosial politik yang ada di sana. Para aktor menyesuaikan praktik tarekat untuk masyarakat urban sehingga mendapat lebih banyak pengikut bahkan terkadang dengan menyamakan nama tarekat di belakangnya.

Kata Kunci: tarekat Naqsyabandiyah, tarekat di Aceh, Aceh, politik dan tarekat, komodifikasi tarekat

Abstract

A socio-religious organization naturally has the instinct to survive in the social changes that surround it, including the tarekat movement. This change was made to gather more worshipers and maintain the existence of the movement in its environment. The

Naqsyabandiyah Khalidiyah sufi order in Aceh is a relatively new compared to other tarekat that have existed there before. This article will try to explain the process of change that occurred in the Naqsyabandiyah tarekat movement in Aceh, the form of change, and the relationship between these changes and power. From the observations and several interviews that the author conducted with groups of tarekat actors, it appears that changes in the Naqsyabandiyah Khalidiyah tarekat in Aceh are closely related to the role played by actors as their agencies. The changes also differ between what one character does to another. The author argues that changes in tarekat in Aceh lead to efforts to build self-existence in the socio-political changes that are there. Actors adapt tarekat practices to urban communities so as to gain more followers, sometimes even by disguising the tarekat name behind them.

Keywords: tarekat Naqsyabandiyah, tarekat in Aceh, politic and tarekat, comodification



PENDAHULUAN

Sebuah organisasi sosial-keagamaan secara alamiah memiliki naluri untuk bertahan dalam perubahan sosial yang ada di sekitarnya. Demikian juga halnya dengan organisasi tarekat. Merupakan sebuah keniscayaan bagi organisasi tarekat untuk mengembangkan, memodifikasi, serta mengaktualisasi doktrin sufi dan ritual tarekat saat berhadapan dengan perkembangan agama, kehidupan sosial dan dinamika politik (Abdurahman 2015, 188). Hal ini dilakukan agar mereka terus *survive* dalam perubahan tersebut. Ada banyak hal dapat dilakukan untuk menjaga tarekat agar dapat terus bertahan. Abd. Syukur misalnya mengemukakan empat usaha yang dilakukan kelompok tarekat dalam rangka mempertahankan organisasi mereka, yakni pembenahan organisasi, memanfaatkan kesempatan politik, mengemas aksi dalam bingkai ideologi, dan membangun kesalehan social (Abd Syukur 2010, 211). Bukan hanya dalam kelembagaan tarekat, penyesuaian dengan perubahan zaman terkadang juga harus dilakukan oleh ulama atau kyai dalam tarekat itu sendiri. Sebab dalam beberapa strata sosial masyarakat di Indonesia telah terjadi sebuah krisis legitimasi pada kyai (Susanto 2007, 111; Nirzalin 2012, 211). Sehingga mereka sudah seharusnya mengubah reorientasi terhadap pola kepemimpinan yang diperankannya dari religio-paternalistik ke arah pola kepemimpinan partisipatif-persuatif (Arifin 1993).

Hal lain yang dilakukan oleh organisasi tarekat adalah mendekati diri dengan kekuasaan. Hal ini memang bukan hal baru mengingat tarekat dan politik telah menjalin hubungan saling menguntungkan sepanjang sejarah tarekat itu sendiri (Anjum 2006, 221). Di Indonesia hal ini juga terjadi dengan dua variasi atau bentuk, aktif dan pasif (Usman 1998, 26–28). Varian aktif adalah varian di mana kyai tarekat mendekati diri pada kekuasaan dengan membawa nama tarekatnya, sementara varian pasif adalah politisi bergabung dengan tarekat dan menggunakan tarekat untuk mendapatkan dukungan memenangkan pemilihan umum (Van Bruinessen 2015, 487–89; Mu'min 2014, 153).

Selain perubahan internal tarekat dan kedekatan tarekat dengan politik, tarekat juga telah bertransformasi dalam bentuk yang baru yang dikenal dengan *urban Sufism* (Howell dan Bruinessen 2006). Kemunculan ini diikuti dengan tokoh-tokoh *televangelis* (Fealy dan White 2008) yang sangat

populer di televisi dengan beragam gaya mereka. Howell berpendapat hal ini merupakan momen di mana sufisme di Indonesia telah berpindah dari sebelumnya berbentuk tarekat di pedesaan menjadi apa yang disebut dengan *urban sufism* di perkotaan. Perbedaannya sangat jelas, dalam *urban sufism*, tokoh utamanya tidak mendapatkan penghormatan berlebihan dari jamaah (Julia Day Howell 2000).

Aceh adalah salah satu daerah yang berubah dengan sangat cepat, terutama dalam isu-isu sosial dan keagamaan (Salim 2010). Dalam kondisi sosial demikian, maka perubahan modern di berbagai belahan dunia dan kota-kota lain juga masuk ke Aceh, termasuk di dalamnya cara bertarekat. Penulis berpendapat bahwa sebagai sebuah gerakan keagamaan maka berbagai perubahan sosial keagamaan lain yang ada di Aceh juga ikut mempengaruhi perubahan dalam tarekat itu sendiri. Artikel ini aka mencoba menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi? Apa saja bentuk perubahannya? dan bagaimana relasi tarekat dan politik terbentuk? Untuk menjelaskan masalah ini penulis melakukan beberapa pengamatan atas beragam aktifitas gerakan tarekat di Aceh kontemporer dan melakukan sejumlah wawancara dengan para pihak yang berkompeten terutama dari kalangan aktifis dan jamaah tarekat. Dari pengamatan tersebut nampak bahwa adanya beragam komodifikasi yang dilakukan oleh organisasi tarekat di Aceh dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, selain perubahan dalam internal ketarekat juga dalam hubungannya dengan organisasi eksternal, termasuk politik.

Tarekat Naqsyabandiyah di Aceh: Sejarah dan Aktor

Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah merupakan tarekat yang masih sangat muda di Aceh. Ia dimulai ketika Mudawali al-Khalidi (w. 1961) kembali dari perantauannya di Sumatera Barat pada tahun 1939. Ia berbai'at menjadi mursyid tarekat pada Syekh Abdul Ghani al-Khalidi dari Bangkinang, Riau (Efendi 2013). Sejak saat itu ia memiliki hak untuk melakukan yang sama kepada jamaah tarekat yang lain. Setelah ia kembali ke Aceh pada ia segera membuat sebuah tempat pengajian yang di kemudian hari berkembang menjadi sebuah pesantren besar di Aceh yaitu pesantren Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan. Di sana pula ia mulai mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah (Dhuhri 2014).

Pada periode awal perkembangannya, Muda Waly mengangkat tiga murid utama dalam tarekat ini. Pertama Adnan Mahmud yang berasal dari Kecamatan Sawang Aceh Selatan namun sudah sejak lama menetap di kecamatan Bakongan, Kabupaten yang sama. Di sana ia mengembangkan sebuah pesantren yang dikenal dengan pesantren Ashhabul Yamin. Adnan bukanlah orang baru bagi Muda Waly. Mereka pernah seperguruan saat pertama kali belajar ilmu agama di pesantren Bustanul Huda, Abi Lampisang, di Aceh Selatan pada tahun 1928. Kedua, Kamarudin, yang sengaja diutus ke kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, dalam upaya melawan dominasi perkembangan Muhammadiyah di sana (Bruinessen, 1983). Sama dengan Adnan ia juga memimpin sebuah pesantren di Desa Tanoh Anoe, Kec. Teunom. Ketiga, Muda Waly juga mengangkat anak sulungnya Muhibuddin Waly sebagai mursyid dalam tarekat ini yang kemudian hari menjadi penerusnya setelah ia meninggal dunia tahun 1961.

Selain tiga orang Mursyid di atas Muda Waly juga mengangkat banyak sekali Khalifah yang berasal dari berbagai daerah di Aceh. Mereka berasal dari santri yang datang padanya untuk belajar agama Islam ketika daerah mereka tidak kundusif karena gangguan keamanan oleh gerakan Darul Islam (Syamsuddin, 1987). Ia tidak mewajibkan santrinya mengikuti tarekat sehingga di kemudian hari banyak santrinya yang sukses mengembangkan pesantren namun tidak menjadi mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah (Dicky Wirianto 2021). Banyak di antara Khalifah yang dipilih oleh

Muda Waly sebenarnya sudah layak menjadi mursyid karena pengalaman dan latihan spiritual yang mereka jalani dalam tarekat Naqsyabandiyah, namun karena usia Muda Waly yang teramat singkat (beliau wafat tahun 1961 dalam usia 44 tahun) maka ia tidak sempat membai'at mereka menjadi Mursid. Anaknya Muhibuddin Waly yang menggantikannya dikemudian hari mengangkat murid-murid ayahnya tersebut menjadi mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah. Beberapa yang diangkat Muhibuddin terkait dengan usaha beliau memenangkan Golongan Karya di Aceh tahun 1980-an. Melalui jaringan inilah tarekat Naqsyabandiyah berkembang luas di Aceh. Hampir semua kabupaten kota yang ada di Aceh memiliki seorang Mursyid dalam tarekat ini dan memiliki ribuan pengikut.

Dari seluruh jejaring kemursyidan yang berkembang di Aceh tersebut ada beberapa aktor yang menempati posisi penting dan mewarnai perubahan dalam tarekat Naqsyabandiyah. *Pertama*, Muhibuddin Waly (w.2012), anak sulung dari Muda Waly sendiri. Pada masa kecilnya selain belajar di sekolah pemerintah ia juga belajar agama kepada orang tuanya. Oleh sebab itu di usia yang masih muda ia telah diangkat menjadi mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ia sempat melanjutkan pendidikannya di Mesir dan kemudian meniti karir di UIN Syarif Hidayatullah dan Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, di mana ia dianugerahi gelar 'Profesor' oleh Presiden Soeharto (Shadiqin 2018, 140). Kedekatannya dengan penguasa Orde Baru membuat ia malang-melintang di beberapa posisi politik hingga berakhirnya Orde Baru. Setelah itu ia kembali ke Aceh dan menjadi bagian dari gerkaan Majelis Ulama Nagroe Aceh (MUNA), sayap organisasi ulama yang didirikan oleh mantan GAM (Firdaus, 2020).

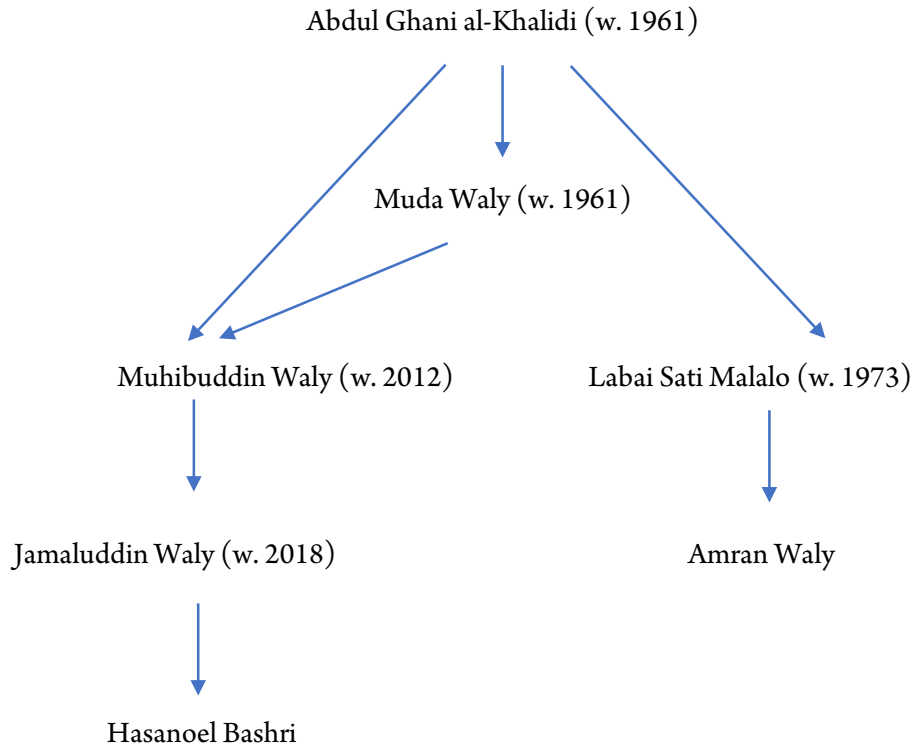
Tokoh kedua adalah adik kandung Muhibuddin Waly, yaitu Jamaluddin Waly (w.2018). Sama dengan kakaknya yang meniti karir dalam bidang politik, Jamaluddin juga menjadi bagian dari partai politik sejak tahun 1960-an dengan menjadi anggota parlemen di Aceh. Ia pertama sekali menjadi anggota DPR-GR di Provinsi Aceh ketika masih berusia 22 tahun dari partai Masyumi. Kemudian karier politiknya berkembang hingga menjadi anggota DPR RI sampai tahun 1998 dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kondisi politik Era Reformasi membuat ia tidak bisa mendapatkan posisi lagi di partai hingga tahun 1999 dan memilih meninggalkan ibukota dan kembali ke Aceh. Di Aceh beliau lebih banyak melakukan aktifitas keagamaan hingga wafat.

Aktor berikutnya adalah Amran Waly. Ia merupakan saudara Muhibuddin Waly dari ibu yang berbeda. Amran memimpin sebuah pesantren Darul Ihsan di Labuhan Haji, tidak jauh dari pesantren dasar orang tuanya. Ia mendapatkan ijazah tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah dari Syaikh Labai Sati dari Malalo, Sumatera Barat. Labai Sati Malalo merupakan sahabat dari orangtuanya, Muda Waly, ketika ia menuntut ilmu di Sumatera Barat sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia pernah menjabat sebagai pimpinan sementara Dayah Darussalam Labuhan Haji ketika Muda Waly wafat sementara anak-anaknya masih dalam pendidikan. Amran pernah menjadi anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Golkar pada tahun 1980-an selama satu periode. Kemudian meninggalkan dunia politik dan lebih banyak mengajar di pesantrennya serta memberikan pengajian kepada masyarakat umum.

Selain ketiga nama dari keturunan Muda Waly di atas, ada juga aktor penting lain dalam pengembangan tarekat ini yaitu Syaikh Hasanoel Bashri dari Kabupaten Bireun. Beliau belajar di Dayah MUDI Mesra pada Abdul Aziz yang merupakan murid dari Muda Waly. Ia bahkan menikah dengan anak gadis gurunya itu dan kemudian menggantikan posisi gurunya memimpin pesantren MUDI Mesra setelah gurunya wafat. Ia mendapatkan ijazah mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah

dari Jamaluddin Waly, dan kemudian mengembangkan tarekat ini di Dayah MUDI Mesra Samalanga, Bireun.

Secara genealogi keguruan keempat aktor tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Genalogi Guru-Murid Aktor taekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh

PEMBAHASAN

Modifikasi Tarekat dalam Majelis Zikir

Dalam perkembangannya, Tarekat Naqsyabandiyah di Aceh melalui aktor-aktor kunci di atas melakukan perubahan dan modifikasi untuk mendapatkan lebih banyak pengikut dengan mendirikan beberapa organisasi keagamaan berbasis tarekat. Melalui organisasi ini mereka bermaksud mempertahankan dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Islam dewasa ini. Hal yang sama juga terjadi dalam kelompok tarekat yang lain, seperti halnya Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Babussalam (TNBK) di Sumatera Utara (Muzakir 2015). Hal ini dilakukan dengan melakukan beberapa komodifikasi penampilan tarekat yang kaku dan hanya sesuai untuk jamaah yang sudah dibaiat kepada kegiatan spiritual yang lebih terbuka yang dapat diikuti oleh jamaah yang lebih luas. Mereka tetap mempertahankan berbagai ritual tarekat, namun membuka beberapa kesempatan kepada jamaah non tarekat untuk mendapatkan beberapa aspek spiritual dalam tarekat. Ada beberapa pola yang telah dilakukan selama ini di mana antara satu dengan yang lainnya memiliki ciri khas sendiri dan berbeda.

Al-Waliyah Aceh Melayu Raya

Organisasi ini didirikan oleh Muhibuddin Waly pada awal tahun 1990 saat ia masih aktif sebagai politisi di Jakarta. Latar belakangnya sederhana, ia merasa saat itu sudah banyak alumni dayah

Darussalam Labuhanhaji tersebar di seluruh nusantara yang –karena jarak dan jaringan komunikasi yang sulit- tidak lagi berhubungan dan saling berkontribusi. Untuk itu, diperlukan sebuah organisasi yang dapat mempersatukan mereka untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Ia mendirikan Yayasan al-Waaliyah yang berpusat di Jakarta. Saat pertama kali berdiri namanya adalah Al-Waliyah Melayu Raya. Organisasi ini bermaksud menjadi wadah perhimpunan alumnus dayah Darussalam Labuhan Haji yang ada di seluruh alam Melayu. Ketika Muhibuddin Waly pulang ke Aceh sekitar tahun 1998 dan memulai kembali aktivitasnya di Aceh, organisasi ini diubah namanya menjadi Al-Waaliyah Aceh Melayu Raya. Penambahan kata ‘Aceh’ dimaksudkan sebagai informasi kalau organisasi tersebut berpusat di Aceh dan melaksanakan kegiatan utamanya di Aceh. Sejak saat itu pula beberapa kegiatan mulai dilaksanakan di sana, seperti pengajian di Makam Syiah Kuala, beberapa pengajian dengan bekerja sama dengan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan menerbitkan majalah “al-Waliyah” yang hanya bertahan sebanyak dua edisi.

Organisasi ini tidak secara langsung mengadakan dan mengelola berbagai kegiatan yang terkait dengan tarekat selain karena posisi Muhibuddin Waly sebagai mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah. Kegiatan mereka lebih banyak pada dimensi sosial keagamaan lain yang memang sesuai dengan posisinya sebagai lembaga “yang menghimpun alumni Dayah Darussalam” ke dalam sebuah wadah komunikasi. Oleh karena itu, misi terpenting dalam organisasi ini adalah menyatukan kembali para alumni untuk membangun sebuah gerakan bersama dalam memelihara memori dan pengetahuan terkait dengan Darussalam. Setelah Muhibuddin Waly wafat pada tahun 2012, tidak ada lagi kegiatan yang diasosiasikan kepada organisasi ini.

Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf

Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) Syaikh H. Amran Waly merupakan salah satu bentuk komodifikasi tarekat Naqsyabandiyah dalam menghadapi perubahan sosial di Aceh. Gerakan ini dibentuk oleh Amran Waly, salah seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah dari jaringan Labai Sati Malalo. Ia membangun gerakannya sejak tahun 2001. Dimulai dari pesantrennya di Desa Pawoh, Labuhanhaji, Aceh Selatan, yang kemudian berkembang ke berbagai daerah di Aceh, kemudian ke berbagai kota di Indonesia, dan ke beberapa kota di Asia Tenggara, terutama Malaysia. Gerakan ini masih terus berlangsung dan eksis dengan kegiatan rutin berupa pengajian dan kunjungan ke pesantren-pesantren. Amran sendiri melakukan perjalanan keliling cabang MPTT setiap tiga bulan sekali (Misbah, 2016).

Ciri utama tarekat ini adalah menghadirkan pengajian tasawuf falsafi di depan masyarakat umum. Berbeda dengan anggapan kebanyakan ulama sufi yang menganggap ide-ide filsafat dalam tasawuf hanya dibicarakan di depan kelompok khusus dalam jamaah sufi, Amran menyampaikan ide ini di depan pengajiannya yang dihadiri masyarakat umum. Menurut Amran, ide tentang tasawuf harus disampaikan kepada umat Islam karena banyak di antara mereka tidak sempat mendengar dan mempelajarinya, sehingga mereka mengikuti pandangan yang keliru tentang ide tersebut. Akibatnya ajaran-ajaran tasawuf yang sangat baik itu menjadi hina dan dibenci oleh umat Islam. Amran mencoba menjelaskan hal ini kepada umat Islam agar mereka setidaknya tahu bahwa itu bukan hal yang buruk dan sesat, meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti (Shadiqin 2018).

Apa yang dilakukan Amran Waly tidak sepenuhnya berlangsung mulus. Kenyataannya ada banyak ulama yang tidak setuju dengan ide dan caranya. Pada tahun 2010, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara menyatakan kalau apa yang diajarkan oleh Amran adalah sesat dan

menghimbau masyarakat untuk tidak menghadiri dan mengikutinya. Mereka bahkan menganjurkan pembakaran terhadap buku-buku yang dikeluarkan Amran yang berisi ajaran *wahdatul wujud* dari Al-Jili. Demikian juga beberapa pengajian Amran ditutup sehingga ia tidak bisa menyampaikan lagi ide-idenya. Hal ini terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kabupaten Bireun (Ichwan 2016).

Gerakan MPTT Amran Waly tampaknya terus berkembang dalam masyarakat Aceh hingga saat ini, terutama setelah mereka mempopulerkan kelompok zikir yang dinamakan dengan Rateb Siribe (lit. zikir seribu). Jamaahnya juga mulai tumbuh bukan hanya dari kalangan masyarakat rural pedesaan, namun juga masyarakat urban kota. Kondisi ini menunjukkan MPTT dapat bertahan dari berbagai tantangan yang terjadi di lingkungannya.

Majelis Zikir al-Waliyah: Komodifikasi Zikir

Majelis Zikir al-Waiyah didirikan oleh Abuya Jamaluddin Waly di Jakarta ketika ia masih aktif menjadi anggota DPR-RI yang hampir 40 tahun lamanya. Pada tahun 1999 ia kembali ke Aceh setelah masa jabatannya di MPR habis dan mulai mengorganisir majelis zikir tersebut. Posisinya sebagai anak kandung Syaikh Muda Waly menjadikan Jamaluddin banyak dikenal oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pada tahun 2001 ia mulai melakukan pengajian di Masjid Raya Baiturrahman, masjid utama di kota Banda Aceh dan beberapa kali memimpin zikir berjamaah di luar Masjid Raya Baiturrahman. Kondisi keamanan Aceh yang saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pertemuan dan perkumpulan secara bebas pada malam hari membuat jamaah ini tidak memiliki aktivitas yang banyak. Satu-satunya zikir besar yang dilaksanakan Jamaluddin adalah memimpin “zikir akbar” di kantor Kodam Aceh tahun 2004 dalam rangka memperingati hari ulang tahun organisasi tersebut.

Jamaluddin mentransformasikan zikir-zikir tarekat ke dalam zikir biasa agar mudah diterima oleh masyarakat umum. Ia tidak menyebutkan zikirnya sebagai zikir tarekat sehingga semua orang merasa bisa ikut dan berpartisipasi. Pun demikian, apa yang dibacanya seungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dibaca oleh jamaah tarekat pada umumnya. Jamaluddin memahami bahwa masyarakat kota Banda Aceh di mana ia mengembangkan organisasinya, istilah ‘tarekat’ tampaknya kurang sesuai dan menarik. Dengan mengabaikan kata ini, ia bisa tetap melakukan zikir bersama dengan jamaahnya. Ia menerbitkan empat jilid buku sebagai pedoman zikir (Waly 2012).

Ide tentang zikir bersama sangat ditopang oleh hubungannya yang sangat personal dengan Ustaz Arifin Ilham, pimpinan Majelis Az-Zikra Jakarta. Istri pertama Arifin Ilham bernama Wahyuniati Waly tidak lain adalah anak perempuan dari Abuya Jamal. Setelah penandatangan perdamaian Aceh antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh merdeka di Helsinki tahun 2005, Arifin Ilham sering pergi ke Aceh, baik atas undangan organisasi tertentu maupun pulang ke kampung istrinya. Selama di sana, ia selalu menyempatkan diri memimpin zikir berjamaah yang –tentu saja- diikuti juga oleh Abuya Jamaluddin.

Abuya Jamaluddin sering mengadakan zikir berjamaah di berbagai kota di Aceh atas undangan pemerintah setempat. Menurut beliau ini adalah salah satu cara bagaimana mengembangkan zikir lebih luas lagi di dalam masyarakat Aceh. Buku pedoman zikir yang disusunnya dijual kepada jamaah agar memudahkan mereka mengikuti zikir yang ia pimpin. Hanya saja ia tidak memiliki jadwal khusus zikir di depan publik seperti halnya Amran Waly di atas. Semua zikirnya berdasarkan undangan pemerintah atau organisasi tertentu.

Setahun sebelum beliau wafat aktivitas sosial Abuya Jamal mulai berkurang. Hal ini tidak lain karena faktor usia dan kesehatannya. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya mengajar di Dayah Asasunnajah di Lam Ateuk Aceh Besar. Di sana ia mengajar setiap pagi kepada para guru dan santri senior. Pada masa-masa suluk, ia juga memimpin suluk di dayah tersebut. Setiap awal bulan beliau pulang ke kampung asalnya, Labuhanhaji, untuk memberikan pengajaran kepada santri dan dewan guru di Dayah Darussalam. Perjalanan bolak-balik 300 km sering membuat ia sangat lelah dan sakit. Inilah yang menyebabkan aktivitasnya atas nama Majelis Zikir al-Waliyah menurun dan berkurang.

Tastafi dan Promosi Tarekat Ahlussunnah

Tastafi adalah akronim dari “Tasawuf, Tauhid, dan Fiqh.” Organisasi ini didirikan oleh Hasanoel Bashri dari Samalanga, Kabupaten Bireun. Ia merupakan pimpinan sebuah pesantren yang sangat terkenal di sana bernama Lembaga Pendidikan Islam Ma’had al-Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Masjid Raya (Mesra) Samalanga atau disingkat dengan MUDI Mesra Samalanga. Masa kejayaan pesantren ini dimulai pada masa kepemimpinan Abdul Aziz (w. 1989) yang tidak lain adalah salah seorang murid utama dari Muda Waly (Sabri, 2004). Setelah Abdul Aziz wafat, pesantren ini dipimpin oleh Hasanoel Bashri hingga saat ini.

Ulama-ulama jaringan MUDI Mesra memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi ulama Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) (Sehat Ihsan Shadiqin dkk 2010). Merekalah yang pernah mengeluarkan fatwa “sesat” kepada gerakan MPTT yang dimotori oleh Amran Waly melalui Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara tahun 2009. Sejak didirikan, pesantren ini memang tidak memiliki tradisi tarekat yang kuat. Teungku Hanafiah yang pernah memimpin pesantren ini sebelum kemerdekaan adalah mursyid dalam tarekat Syattariyah, namun beliau tidak terlalu menekankan tarekat ini kepada jamaahnya. Demikian juga Teungku Abdul Aziz yang menggantikannya. Abdul Aziz lebih dikenal karena kemahirannya dalam ilmu fiqh dibandingkan ilmu yang lain. Ia adalah seorang ahli debat dan menguasai ilmu mantiq. Murid-muridnya bahkan menggelar beliau dengan Abdul Aziz al-Mantiqi karena kepakarannya tersebut. Namun demikian, pada tahun 2012, Teungku Hasanoel dibaaiat menjadi mursyid dalam tarekat Naqsybandiyah oleh Djamaluddin Waly. Dengan demikian, pesantren Mudi Mesra Samalanga menjadi salah satu pusat pengembangan tarekat ini di pantai Utara Aceh.

Kehadiran Tastafi sendiri tidak dapat dilepaskan dari rivalitas ulama-ulama ini dengan Amran Waly dan ide-idenya. Tastafi sendiri dipilih menjadi nama gerakan ini untuk menunjukkan bahwa pengajian yang harusnya diikuti oleh umat Islam bukan hanya pengajian tasawuf saja seperti yang diajarkan Amran Waly, namun harus didampingi dengan pengajian tauhid dan fiqh. Dengan demikian ilmu yang dimiliki umat juga akan lengkap dan tidak timpang. Sebab dengan hanya belajar tasawuf maka orang akan cenderung mengabaikan masalah-masalah ritual agama yang juga tidak kalah pentingnya.

Pengajian Tastafi semakin berkembang ketika mereka mendapatkan tempat di masjid Raya Baiturrahman pada tahun 2014. Pengajian pertama dilaksanakan pada 7 Maret 2014 dan kemudian pengajian diadakan setiap awal bulan yang diisi langsung oleh Teungku Hasanoel Bashri. Di sana mereka melaksanakan model pembelajaran pesantren di mana teungku membaca kitab *Sair al-Salikin* karya al-Falimbangi. Dari tahun 2015 metode ini diubah atas permintaan banyak jamaah, yakni dengan pengajian dan dialog interaktif dengan jamaah. Beberapa stasiun radio di Kota Banda

Aceh menyiarkan pengajian secara langsung. Rekaman pengajian juga selalu di-*upload* ke situs resmi mereka di media sosial Youtube.

Tarekat dan Politik

Selain melakukan modifikasi tarekat ke dalam majelis zikir dan majelis pengajian, para tokoh penting ulama dalam tarekat Naqsyabandiyah juga memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah di Aceh. Setidaknya ada dua orang anak Syaikh Muda Waly yang memiliki pengaruh besar dalam tarekat Naqsyabandiyah. Mereka membangun afiliasi yang berbeda dengan pemerintah. Kalau Muhibuddin Waly cenderung membangun hubungan dengan mantan Gerakan Aceh Merdeka yang setelah penandatanganan MoU Aceh tahun 2005 menguasai panggung politik pemerintahan di Provinsi Aceh, Amran Waly lebih banyak bermain di kabupaten dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten.

Muhibuddin Waly dan hubungannya dengan MUNA

Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) adalah salah satu organisasi perkumpulan ulama di Aceh. Selain MUNA sudah ada Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Inshafuddin, Rabithah Ulama Dayah Aceh (RUDA), dan tentu saja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Semua organisasi ini beranggotakan ulama di Aceh. Setiap organisasi memiliki visi dan misi yang berbeda sesuai dengan namanya. Terkadang ada banyak ulama yang aktif dalam beberapa organisasi sekaligus (Firdaus 2020).

MUNA sendiri memiliki afiliasi dengan GAM. Ia didirikan tahun 2007, jauh sebelum dilakukan penandatanganan damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia tahun 2005. MUNA didirikan dalam sebuah musyawarah yang dilakukan di Hotel Rajawai Banda Aceh pada tahun 2007 tersebut. Pendirian MUNA sendiri didasari pada pandangan bahwa ulama yang berada di bawah MPU Aceh memiliki hubungan dengan Pemerintah Indonesia yang tidak mereka sukai. Oleh karena itu, mereka menolak segala hal yang diputuskan MPU dengan membentuk majelis ulama sendiri, yang lebih Aceh dan lebih dekat dengan rakyat. Di desa-desa MUNA juga disebut dengan Majelis Ulama GAM.

Melihat dari peran yang hendak dimainkannya, MUNA tidak tampak memiliki afiliasi politik dengan GAM dan tidak pula memiliki agenda politik sendiri. Dalam blog mereka (yang tampaknya tidak *update*) disebutkan beberapa peran yang ingin dilakukan MUNA:

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Nanggroe Aceh telah dirumuskan peran perannya yaitu:

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zuama* dan cendekiawan Muslim untuk mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- d. Sebagai pemberi masukan fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Muhibuddin Waly memiliki peran penting dalam MUNA sejak pertama kali didirikan. Ia menjadi penasehat sekaligus orang yang membaiai dan meresmikan bedirinya berbagai cabang MUNA di berbagai daerah di Aceh. Setelah terjadi perdamaian di Aceh, ia masih aktif di sana dengan menjadi penasehat MUNA dan beberapa kali mengikuti pertemuan yang diinisiasi oleh MUNA. Muhibuddin Waly memiliki alasan sendiri atas hubungan ini. Kepada Peneliti beliau pernah mengatakan bahwa alasannya bergabung dengan MUNA karena beliau merasa kedekatan dengan penguasa memiliki ruang untuk menyampaikan ide-ide keagamaannya. MUNA yang saat ini memiliki basis kekuasaan di kampung-kampung diyakini bisa menjadi wadah berdakwah yang baik. Apalagi beliau berkeyakinan kalau banyak ulama yang bergabung dengan MUNA adalah mereka yang terpinggirkan dalam organisasi keagamaan yang sudah ada sebelumnya di Aceh, seperti MPU, HUDA, Insyafuddin dan lainnya. Secara kualitas keagamaan mereka juga tidak dapat disebut sebagai ulama yang memiliki kemampuan yang baik dalam pemahaman ajaran Islam. Beliau yakin kehadirannya di tengah-tengah ulama MUNA dapat memberikan perspektif yang benar kepada mereka dan mewarnai gerakan MUNA itu sendiri.

Kenyataan bahwa setelah pulang dari Jakarta, Abuya Muhibuddin Waly tidak memiliki wadah aktualisasi diri yang representatif. Ketika ia meninggalkan Aceh dalam waktu yang lama, banyak afiliasi yang terputus dengannya. Oleh karena itu, dalam kapasitas keulamaannya, kapasitasnya sebagai keturunan dari ulama pula, ia membutuhkan sebuah tempat untuk mengaktualisasi ide-ide dan pemikiran keislamannya. Kepada Peneliti ia mengatakan: "IAIN, lembaga tempat Saudara (Peneliti) bekerja itu tidak mau menerima saya, MPU juga tidak membutuhkan saya, ya sudah saya bergabung dengan mereka (MUNA)," katanya.

MUNA yang memang tidak memiliki tokoh besar dari kalangan ulama menerima Muhibuddin dengan sangat gembira. Ia ditempatkan sebagai penasihat MUNA yang memiliki tugas memberikan nasehat-nasehat kepada para ulama dan bahkan membaiai atau melantik pengurus MUNA. Meskipun pada masa itu GAM masih sedang melakukan perlawanan terhadap pemerintah RI, dan MUNA berafiliasi dengan GAM, namun hubungan ini tidaklah diakui secara resmi. MUNA sama sekali bukan organisasi terlarang di Aceh. Mereka tetap dapat melaksanakan aktivitasnya sebagaimana aktivitas organisasi yang lainnya. Hanya saja beberapa kegiatan yang menunjukkan sisi oposisi mereka dengan negara dilaksanakan di tempat tertutup dan tanpa pantauan media atau aparat pemerintah.

Setelah penandatanganan MoU antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki pada 15 Agustus 2005, MUNA tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi melaksanakan aktivitasnya. Apalagi pada tahun 2006 Irwandi Yusuf yang merupakan salah seorang pentolan GAM menjadi Gubernur Aceh. Meskipun ia tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari GAM –karena pada saat pemilihan GAM secara resmi mengusung pasangan yang lain- namun MUNA tetap memiliki tempat yang lebih baik dalam pemerintahan. Pada saat ini pula Abuya Muhibuddin memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah. Ia bahkan terlibat secara dekat dalam beberapa proses yang terkait dengan integrasi GAM kepada Pemerintah Indonesia.

Amran Waly dan Pemerintah Kabupaten

Berbeda dengan Muhibuddin Waly, Amran Waly justru memiliki kedekatan dengan pemimpin kepala daerah di beberapa kabupaten Aceh. Beberapa orang bupati dari kabupaten yang berbeda telah menjadi jamaah tetap Abuya Amran Waly dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Kedekatan ini bisa jadi sebuah hubungan yang menguntungkan keduanya. Di satu sisi gerakan dakwah MPTT

sangat membutuhkan dukungan dana dan perhatian dari pemerintah daerah. Di sisi lain Bupati membutuhkan dukungan massa yang banyak dalam melaksanakan program pembangunan dan juga jika ia hendak mempertahankan posisinya melalui pemilihan umum.

Hubungan ini dapat kita lihat dalam berbagai dukungan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan muzakarah MPTT. Pada tahun 2009 misalnya, Bupati Aceh Barat mendukung penuh konferensi MPTT pertama yang dilaksanakan oleh Amran yang melibatkan ribuan jamaah tarekat dari seluruh Indoensia dan bahkan Malaysia. Konferensi pertama yang dilaksanakan oleh MPTT ini sejatinya dilaksanakan di Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebab, saat itu tidak mudah melaksanakan acara di kota-kabupaten, apalagi kabupaten bagian barat dan selatan Aceh, karena jalan yang rusak akibat tsunami. Pemerintah Provinsi yang saat itu di bawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf pada prinsipnya sudah setuju dengan acara tersebut. Namun tiga minggu sebelum acara dimulai, ia membatalkan dukungannya. Padahal saat itu undangan sudah disebarkan dan beberapa kelompok tarekat di Indonesia dan di Malaysia sudah mengatakan komitmennya untuk hadir. Hal ini menyebabkan pihak MPTT harus berfikir keras mencari solusi. Mereka akhirnya mendapatkan dukungan dari Bupati Aceh Barat yang saat itu dijabat oleh Ramli MS. Ia menyanggupi menjamu ratusan anggota tarekat yang akan datang ke kotanya, menjemput mereka ke Banda Aceh, menyediakan penginapan, dan makanan. Komitmen Bupati Ramli ini menjadi solusi yang sangat menggembirakan bagi MPTT saat itu mengingat jika tidak menemukan dukungan acara yang telah disiapkan jauh hari tersebut terancam gagal.

Mudzakarah MPTT yang kedua dilaksanakan di Trengganu, Malaysia. Di sana Amran memiliki sejumlah murid yang menjadi *organizer* acara. Sementara mudzakah ketiga tahun 2014 dilaksanakan kembali di Aceh. Hubungan baik antara Abuya Amran dengan pemerintah sangat terlihat. Mudzakah digelar di Aceh Barat Daya dengan Bupati Aceh Barat Daya yang menjadi sponsor utamanya. Ia mencurahkan dana milyaran rupiah untuk kesuksesan acara tersebut. Kebijakannya sempat menuai protes dari ulama-ulama yang tidak terlibat dalam mudzakah atau bahkan anti dengan gerakan Amran Waly hingga Bupati Aceh Barat daya kemudian mendanai keberangkatan umrah puluhan ulama yang menyatakan protes tersebut.

Tahun 2017 Pemilihan Kepala Daerah di berbagai kabupaten di Aceh akan dilaksanakan, sehingga tahun 2016 adalah masa untuk kampanye. Di Kabupaten Nagan Raya muncul beberapa calon yang akan bertarung untuk mendapatkan suara terbanyak dan duduk sebagai bupati. Oleh karena itu, lobi-lobi mencari dukungan sering dilakukan. Termasuk lobi-lobi pada organisasi sosial keagamaan agar mereka mengeluarkan kebijakan mendukung pasangan tertentu dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Salah satu calon pasangan bupati di sana memberikan surat kepada MPTT dan menjanjikan pelaksanaan mudzakah MPTT berikutnya akan dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya jika ia dapat duduk sebagai bupati. Peneliti tidak dapat memastikan apakah Abuya Amran setuju atau tidak dengan tawaran tersebut, namun di kalangan jamaah MPTT Nagan Raya berkembang kesepakatan bersama untuk mendukung calon dimaksud.

Hasanoel Bashri dan Gubernur

Seperti telah disinggung sebelumnya, Hasanoel Bashri adalah salah seorang ulama dalam jaringan tarekat Naqsyabandiyah di Aceh yang berusaha membangun eksistensi dalam kehidupan sosial keagamaan di Aceh. Salah satu hal yang diperjuangkannya adalah berdirinya Aceh sebagai daerah dengan mazhab tunggal *ahlussunnah waljamaah* atau dalam keseharian disingkat dengan ASWAJA.

Aswaja diperjuangkan sebagai mazhab tunggal bagi seluruh masyarakat Aceh. Hal ini bukan hanya dilakukan melalui dakwah lisan di masjid dan forum pengajian yang lain, namun juga diusahakan melalui gerakan politik. Relasi-relasi politik yang terbangun antara ulama dan penguasa dimanfaatkan antara lain untuk menyuarakan keinginan menerapkan mazhab tunggal tersebut. Apalagi teungku dayah memiliki modal politik yang kuat dalam masyarakat karena genealogi keilmuannya (Nirzalin 2018).

Pada tahun 2016 ketika mulai dilaksanakan kampanye pemilihan umum untuk Gubernur Provinsi Aceh untuk periode 2017-2022 banyak politisi dan ulama saling membangun relasi. Hasanoel Bashri melalui organisasi Tastafi membangun relasi dengan calon dari mantan GAM, Muzakir Manaf yang dikenal dengan nama Mualem. Mualem berpasangan dengan T.A. Khalid, politisi dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, tokoh yang menjadi musuh bebuyutan Mualem saat ia masih menjadi komandan GAM pada masa konflik.

Hasanoel dan beberapa ulama yang seide dengan beliau mendukung sebuah arak-arakan bersama menuntut penerapan mazhab tunggal di Aceh pada Oktober 2015. Dalam kesempatan tersebut Tgk. Bulqaini yang merupakan murid dari Abon Hasanoel mendeklarasikan Mualem sebagai “Umar bin Khatab akhir zaman.” Hal ini untuk menunjukkan betapa Mualem adalah orang tegas, kuat, berwibawa layaknya Umar bin Khatab, Khalifah kedua umat Islam, yang mampu menegakkan ajaran Islam secara tegas dan konsisten memegang hukum agama. Ide ini berkembang sangat cepat di Aceh. Mualem sendiri berkunjung kepada ulama-ulama senior di sana untuk mengatakan bahwa ia akan berkomitmen memperjuangkan Islam *ahlussunnah* jika terpilih menjadi Gubernur Aceh. Saat berkunjung ke Aceh Selatan, ia sempat mengunjungi Abu Marhaban Bakongan, anak dari Abu Adnan Bakongan. Abu Marhaban dalam kesempatan itu mengatakan bahwa “Mualem adalah orang yang sangat serius memperjuangkan *ahlussunnah wal jamaah*” dan karenanya umat Islam di Aceh harus mendukung.

Klaim tersebut adalah bagian dari usaha ulama dayah untuk memposisikan diri sedekat mungkin dengan calon pemimpin yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur dan memiliki kesempatan yang besar untuk mentransformasikan ide-ide keagamaan mereka kepada penguasa. Bahkan pada bulan Agustus 2016 Hasanoel sendiri diangkat dan ditetapkan sebagai salah seorang anggota “*tuha peut wali nanggroe*” semacam dewan penasehat bagi “Wali Nanggroe” (kesultanan) di Aceh.

Banyak kritik atas kecenderungan ulama dalam politik ini, baik dari kalangan cendekiawan muslim di Aceh, maupun dari kalangan ulama sendiri. Teungku Nuruzzahri atau dikenal dengan panggilan Waled Nu salah seorang yang tampaknya kurang setuju dengan keterlibatan ulama dalam politik praktis di Aceh. Dalam sebuah artikel yang dipublikasi di harian Serambi Indonesia ia mengatakan:

“Tampak kekuasaan memang bukan wazifah-nya ulama. Melihat kepada akhlak dan kehidupan masyarakat Islam dan Aceh khususnya seperti hari ini, para ulama belum saatnya menjadi pemimpin. Untuk saat ini para ulama lebih baik menjadi penasehat pemimpin. Karena tidak banyak dari kalangan kabinet pemimpin hari ini yang mengerti agama. Jika satu saat nanti banyak cendekia Islam yang paham agama, sudah mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan, maka silakan nanti ulama menjadi pemimpin umat” (Nuruzzahri 2016).

Apa yang dikemukakan oleh Waled Nu di atas merupakan salah satu pandangan bagaimana sikap masyarakat pada partisipasi ulama dalam politik. Namun demikian banyak ulama yang memahami sebaliknya, memandang dengan berpolitik, berbagai ide dan pemikiran mazhab *aswaja* dapat ditegakkan di Aceh di masa yang akan datang dan Islam yang benar dapat dilaksanakan di Aceh.

Restrukturisasi Organisasi Tarekat

Usaha bertahan dalam berbagai perubahan sosial di Aceh juga dilakukan dengan restrukturisasi organisasi tarekat. Setelah Muda Waly wafat, kepemimpinan dalam tarekat mengalami dinamika. Walaupun ia mewariskan kepemimpinan tarekat kepada putra sulungnya, dan putra sulungnya menyerahkan kepada adiknya, namun di sana terdapat beberapa mursyid lain yang merasa tidak memiliki hubungan langsung dengan mursyid tersebut. Setiap mursyid seolah memiliki otoritas sendiri dalam melaksanakan amalan-amalan tarekat dan mengembangkannya. Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam proses pengangkatan mursyid dan terbentuknya “lembaga baru” yang dinamakan dengan “*mursyid al-‘am*” yang mengindikasikan kepemimpinan utama atas semua mursyid-mursyid yang ada di Aceh saat ini.

Mursyid ‘Am sebagai lembaga baru

Hierarki dalam tarekat sudah jelas, dari jamaah ke khalifah, *munafiz*, wakil mursyid, hingga menjadi mursyid. Siapa yang berhak mengangkat siapa juga jelas diatur dalam kebiasaan mereka. Kenyataannya, hal ini tidak sepenuhnya berjalan dalam praktek tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh. Setelah Syaikh Muda Waly wafat para murid tarekat segera bermusyawarah menentukan siapa pengganti beliau. Dari hasil musyawarah para ulama tarekat pada masa itu, maka ditetapkanlah Abuya Muhibuddin Waly sebagai pengganti Syaikh Muda Waly menjadi *mursyid al-‘am* dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh. Hal ini dianggap layak karena Abuya Muhibuddin adalah murid langsung dari Syaikh Muda Waly dari sejak kecil hingga ia menamatkan pendidikan di dayah. Ia juga anak kandung dari Syaikh Muda Waly yang menguasai berbagai ilmu keislaman, termasuk ilmu tarekat. Bahkan pada usia 19 tahun beliau telah dibaiat sebagai mursyid dalam tarekat ini oleh dua orang guru tarekat yang sangat berpengaruh, Syaikh Muda Waly dan Abdul Ghani al-Kanfari. Setelah Abuya Muhibuddin wafat, kepemimpinan tarekat beralih kepada adiknya, Abuya Jamaluddin Waly. Saat beliau menjadi mursyid, ia mengangkat beberapa orang mursyid lain di wilayah pantai Utara Aceh, yakni Teungku Hasanoel Bashry dan Teungku Zuhdi.

Dari dua transformasi mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang telah terjadi di Aceh maka tampak tidak ada masalah yang berarti. Pada kali pertama, Muhibuddin memang telah disiapkan oleh orangtuanya sebagai mursyid ketika ia masih sangat muda. Ia menjadi mursyid setelah disepakati oleh tokoh-tokoh tarekat yang lain ketika orang tuanya wafat. Namun dalam periode kedua hal ini tidak terjadi. Pengangkatan Abuya Jamaluddin Waly terjadi begitu saja yang tidak melibatkan banyak mursyid lain yang masih hidup, terutama mursyid dari garis murid Syaikh Muda Waly. Beberapa mursyid lain mengatakan bahwa Abuya Jamaluddin mengambil posisi tersebut karena beliau masih berada dalam garis keturunan Syaikh Muda Waly. Secara pengalaman memimpin jamaah tarekat dan kedekatannya dengan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Aceh masih kurang. Beliau menetap di Jakarta sebagai politisi hampir 40 tahun. Namun demikian, hubungan darahnya dengan Syaikh Muda Waly membuat beliau ditempatkan sebagai mursyid menggantikan abangnya.

Sesungguhnya dari keturunan Syaikh Muda Waly sendiri masih ada Abuya Amran Waly yang secara aktif menjadi mursyid dalam tarekat dan memimpin jamaah. Ia memang pernah menjadi anggota DPRD Aceh Selatan dari Partai Golkar selama kurang dari satu periode, namun kemudian tidak melanjutkan karir politik di sana. Ia lebih banyak beraktivitas di dayah dan mengembangkan organisasi MPTT yang dibentuknya. Namun ia tidak mendapatkan kepercayaan menjadi mursyid dari Muhibuddin Waly karena beberapa perbedaan cara pandang antara keduanya seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selain dari keturunan Syaikh Muda Wali tersebut ada juga beberapa mursyid lain yang bukan keturunan Syaikh Muda Waly. Banyak di antara mereka aktif dalam membangun pesantren dan memimpin jamaah dalam tarekat.

Banyaknya mursyid inilah yang menyebabkan Abuya Muhibuddin Waly mendeklarasikan diri beliau sebagai *mursyid al-'am* yang berarti mursyid utama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, semua mursyid memiliki hak yang sama, bahkan dapat mengangkat seorang mursyid sekalipun. Namun dengan adanya *mursyid al-'am* maka yang mengangkat mursyid menjadi kewenangan *mursyid al-'am* tersebut. Pun demikian, beberapa orang mursyid tidak peduli dengan klaim ini dan mereka tetap mengangkat mursyidnya sendiri. Abuya Amran Waly misalnya mengangkat Abu Muhammad Ismi sebagai mursyid. Bahkan pada saat Abuya Muhibuddin masih hidup, Abuya Jamaluddin mengangkat adiknya Abuya Ruslan Waly sebagai mursyid pula. Pun demikian, beberapa orang mursyid mengaku tetap memberikan kewenangan kepada *mursyid al-'am* dalam pengangkatan mursyid. Misalnya apa yang dilakukan oleh Abu Karimuddin dari Aceh Utara. Meskipun beliau telah menjadi mursyid, namun ia meminta Abuya Jamaluddin Waly yang mengangkat anaknya, Tgk. Zuhdi sebagai mursyid.

Pengangkatan Mursyid

Keberadaan *mursyid al-'am* di satu sisi memang untuk mengangkat mursyid lain yang baru. Namun dengan posisi tersebut pengangkatan seorang mursyid juga tidak lepas dari strategi untuk mendominasi dan memperluas jangkauan penyebaran tarekat. Abuya Muhibuddin Waly misalnya mengangkat Mursyid pada masa transisi partai dalam rezim Orde Baru. Pengangkatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dalam rangka memenangkan pemilihan umum. Beliau berharap mendapatkan dukungan massal dari jamaah tarekat yang ada yang berada di bawah mursyid yang telah diangkatnya. Dengan demikian, akan secara signifikan mengangkat suara Golkar dalam pemilihan umum di Aceh yang sebelumnya selama beberapa kali pemilihan didominasi oleh perolehan suara PPP. Ini lumrah karena PPP bagi orang Aceh masih disadari sebagai hasil fusi dari partai-partai Islam sebelumnya, seperti Masyumi, Nahdatul Ulama, dan juga Perti. Perti sendiri merupakan partai yang memiliki akar pada organisasi keagamaan yang dikembangkan oleh Syaikh Muda Waly guru tarekat Naqsybandiyah Khalidiyah pertama di Aceh.

Jamaluddin Waly misalnya mengangkat dua orang mursyid dari Biruen dan Aceh Utara yang secara geografis berada di pantai timur Aceh. Hal ini dilakukan beberapa tahun saja setelah beliau kembali ke Aceh. Hal ini bisa jadi sebagai strategi memperluas jangkauan pengaruhnya yang telah sekian lama meninggalkan Aceh. Dengan mengangkat Abon Mudi Samalanga, secara tidak langsung Abuya Jamaluddin telah menjadi bagian dalam tradisi pesantren di sana yang selama ini memang sudah besar dan dikenal.

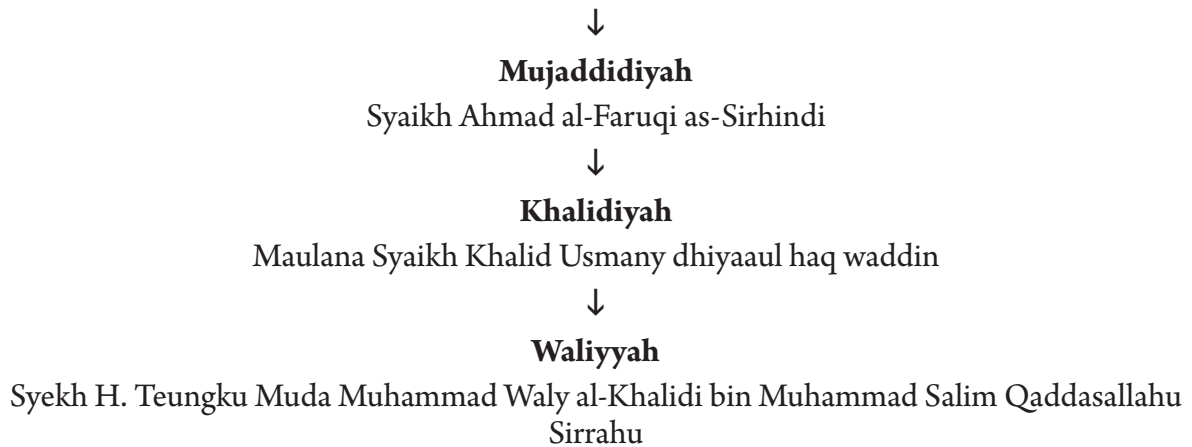
Membangun Tarekat “Al-Waliyah” sebagai Tarekat Baru

Selain dua hal yang disebutkan di atas, hal lain yang juga sangat penting dalam konteks menjaga eksistensi tarekat ini adalah melakukan perubahan nama dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarekat yang semula bernama Naqsyabandiyah Khalidiyah ditambah menjadi Naqsyabandiyah Khalidiyah Waliyah. Perubahan nama ini sudah lama dilakukan, namun tampaknya tidak populer di kalangan masyarakat. Hal ini kemungkinan karena nama Naqsyabandiyah Khalidiyah sendiri sudah jauh lebih populer dan dikenal di kalangan masyarakat dibandingkan dengan nama al-Waliyah sehingga mereka lebih suka menyebutnya dengan tarekat Naqsyabandiyah saja.

Perubahan nama dalam tarekat memiliki sejarah yang amat panjang. Pada setiap momen di mana terdapat seorang “waliyullah” yang dianggap memiliki ilmu dan kesalihan yang sangat baik maka namanya akan diabadikan sebagai nama baru dalam tarekat. Perubahan nama dalam tarekat ini dapat dilihat dari silsilah guru tarekat itu sendiri. Pada awalnya tarekat ini disebut dengan “Shiddiqiyah” merujuk kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Kemudian muncul tokoh penting lain Syaikh Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan al-Bisthami yang menyebabkan tarekat ini dinamakan dengan “Thaifuriyah”. Selanjutnya muncul Syekh Abdul Khaliq al-Ghajduwany bin al-Imam Abdul Jamil Qaddasallahu Sirrahu hingga disebut “Khawajakaaniyyah.” Baru kemudian muncul Syaikh Bahauddin bin Muhammad bin Muhammad Asy-Syarif al-Husainy Al-Hasany al-Uwaisy al-Bukhary yang kemudian tarekat ini disebut dengan “Naqsyabandiyah.” Tarekat ini berganti nama menjadi “Ahraariyyah” setelah dipimpin oleh Syekh Nasiruddin ‘Ubaidullah al-Ahraar as-Samarqandy bin Mahmud Syihabuddin Qaddasallahu Sirrahu. Lalu kemunculan Syaikh Ahmad al-Faruqi as-Sirhindi mengubah nama tarekat menjadi “Mujaddidiyah”. ‘Khalidiyah’ dinisbahkan kepada Maulana Syaikh Khalid Usmany Dhiyaaul Haq Waddin. Baru pada masa kepemimpinan Muhibuddin Waly beliau menamakan tarekat ini dengan “Waliyyah” menisbahkan kepada orang tuanya Syekh H. Teungku Muda Muhammad Waly al-Khalidi bin Muhammad Salim Qaddasallahu Sirrahu.

Secara sederhana proses tersebut dapat dilihat dalam skema berikut:





Gambar 2: Proses Perubahan Nama dalam Tarekat Waaliyyah

Abuya Muhibuddin Waly mengatakan penyebutan nama ‘Al-Waliyah” untuk tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini untuk mengenang tokoh penting dari tarekat ini di Aceh, yakni Muda Waly al-Khalidi yang tidak lain adalah oang tuanya. Abuya Muhibuddin Waly memandang kapasitas Muda Waly dalam agama, tarekat, dan peranan yang beliau mainkan selama hidup menunjukkan betapa beliu adalah orang yang sangat mulia di mata umat dan mulia di sisi Allah. Hal ini menjadikan beliau sangat layak untuk dianggap sebagai imam yang namanya diabadikan dalam tarekat yang ia bawa, yakni tarekat Naqsyabandiyah.

Perubahan nama tarekat ini dapat dipahami juga sebagai perubahan identitas di kalangan jamaah Naqsybandiyah sendiri, independensi, dan lokalitas. Kalau sebelumnya tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dikenal sebagai bagian dari tarekat dunia yang lenbih luas dan tersebar di mana-mana dengan Aceh adalah salah satu tempat penyebarannya, maka dengan adanya nama baru “Al-Waliyah” tarekat ini berusaha memotong hubungan tersebut dengan nama baru. Oleh karena itu, dengan perubahan nama ini maka tarekat Naqsybandiyah di Aceh menjadi sebuah tarekat “lokal Aceh” yang memiliki ciri yang berbeda dengan tarekat sejenis di daerah lain di Indonesia.

PENUTUP

Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang berkembang di Aceh menghadapi beragam perubahan yang terjadi di sana. Ada tiga pola penting yang dilakukan oleh tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh dalam menghadapi tuntutan perubahan ini. *Pertama*, membangun organisasi turunan non-tarekat namun memiliki afiliasi langsung dengan tarekat Naqsyabandiyah itu sendiri. *Kedua*, membangun afiliasi politik dengan aktor-aktor politik lokal dalam membangun eksistensi mereka. Berbeda dengan apa yang umumnya terjadi di Indonesia, afiliasi dengan politik yang terjadi dalam tarekat di Aceh diwakili oleh organisasi turunannya, bukan oleh organisasi tarekat secara langsung. *Ketiga*, membangun sebuah struktur “baru” dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Aceh. Tiga pola adaptasi yang dilakukan tarekat Naqsybandiyah di atas tidak dapat dilepaskan dengan konteks dinamika internal tarekat dan eksternal masyarakat Aceh secara umum.



BIBLIOGRAFI

- Abd Syakur. 2010. "Mekanisme Pertahanan Diri Kaum tarekat." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2: 211–228.
- Abdurahman, Dudung. 2015. "Sosiologi Kum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-interkoneksi." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 9, no. 2: 175–190.
- Anjum, Tanvir. 2006. "Sufism in History and its Relationship with Power." *Islamic Studies* 45, no. 2: 221–268.
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Kalimasahada Press.
- Dhuhri, Saifuddin. 2014. *Dayah: menapaki jejak pendidikan warisan endatu Aceh*. Lhee Sago Press.
- Dicky Wirianto. 2021. *Pendidikan Tasawuf Abuya Syaikh Haji Muhammad Waly al-Khalidi: Konsep dan Genealogy tarekat Naqsyabandiyah di Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Efendi, Aprijon. 2013. *Biografi Syekh Haji Abdul Ghani al-Khalidi: ulama sufi karismatik dari Batu bersurat Kab. Kampar-Riau 1831-1961*. Zanafa Publishing.
- Fealy, Greg, dan Sally White. 2008. *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Firdaus, Insan. 2017. "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4: 429–443.
- Howell, Julia D., dan Martin van Bruinessen. 2007. "Introduction: Sufism and the 'modern' in Islam." *Sufism and the 'modern' in Islam*, 3–18.
- Howell, Julia Day. 2000. "Indonesia's Urban Sufis: Challenging Stereotypes of Islamic Revival." *ISIM Newsletter* 6, no. 1: 17–17.
- Ichwan, Mochammad Nur. 2016. "Neo-Sufism, shariatism, and ulama politics: Abuya Shaykh Amran Waly and the tauhid-tasawuf movement in Aceh." *Islam, politics and change*, 221–246.
- Mu'min, Ma'mun. 2014. "Pergumulan Tarekat Dan Politik (Peranan Kyai Haji Muhammad Shiddiq Dalam Tarekat Dan Politik Di Kudus)." *Fikrah* 2, no. 1: 60928.
- Muzakir. 2015. "Dari Sakral ke profan: Globalisasi dan Komodifikasi dalam Dunia Spritual dengan Ilustrasi Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Babussalam (TNKB)." *Jurnal Akademika* 20, no. 1.
- Nirzalin, Nirzalin. 2012. "Islamic Shari'a Politics and Teungku Dayah's Political Authority Crisis in Aceh." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 2.
- . 2018. "Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah di Aceh." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2: 185–195.
- Nuruzzahri. 2016. "Politik Ulama dan Ulama Berpolitik - Serambi Indonesia." 2016. <https://aceh.tribunnews.com/2016/05/30/politik-ulama-dan-ulama-berpolitik>.
- Salim, Arskal. 2010. *Serambi mekkah yang Berubah*. Pustaka Alvabet.
- Sehat Ihsan Shadiqin dkk. 2010. "Peran HUDA dalam Perubahann Sosial dan Politik di Aceh Pasca Orde Baru." Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry.

- Shadiqin, Sehat Ihsan. 2018. "Tasawuf di Era Syariat: Tipologi Adaptasi dan Transformasi Gerakan Tarekat dalam Masyarakat Aceh Kontemporer." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20, no. 1: 66–79.
- Susanto, Edi. 2007. "Krisis Kepemimpinan Kiai: Studi atas Kharisma Kiai dalam Masyarakat." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2: 111–120.
- Usman, Sunyoto. 1998. "Komunitas Tarekat Dan Politik Lokal Di Era Orde Baru Penelitian di Kudus, Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2, no. 1: 26–39.
- Van Bruinessen, Martin. 2015. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Yogyakarta*. Gading Publishing. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Waly. 2012. *Jamaluddin, Panduan Zikir dan Doa Bersama*.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

